Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu tentang kinerja pemerintahan daerah menjadi sorotan publik karena belum maksimal menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan.

Memburuknya kinerja pada Instansi pemerintahan, World Economic Forum (WEF) telah merilis indeks daya saing Indonesia yang turun dari peringkat ke-37 menjadi posisi 41. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengakui, penurunan daya saing ini disadari pemerintah menjadi suatu tantangan serius yang harus segera ditanggulangi.(www.republika.co.id, 3 Oktober 2016)

Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Sistem akuntabilitas pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 adalah pedoman penting bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih berdaya guna. Lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lanjut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 “Setiap instansi pemerintah baik dari pusat maupun di daerah wajib menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan laporan kinerja”.

Untuk kota Pekanbaru sendiri, Pusat Studi Sosial Politik (Puspol) Indonesia mengungkapkan 35 persen warga Pekanbaru tidak puas dengan kinerja Pemkot Pekanbaru, 2 persen sangat tidak puas, 36 persen menilai biasa saja, dan hanya 15 persen merasa puas atas program pemerintahan. Dari hasil survey tersebut menggambarkan kecendrungan warga tidak puas terhadap kinerja Pemerintah Kota Pekanbaru saat itu. Sejumlah isu memang menjadi sorotan warga Pekanbaru belakangan ini. Di antaranya bencana banjir, dugaan penyelewengan dana APBD, pembangunan Kantor Wali Kota Pekanbaru yang menyedot dana triliunan rupiah di tengah bertambahnya jumlah penduduk miskin dan isu nepotisme di lingkungan birokrasi.(metronews.com, 10 Mei 2016)

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap wilayahnya tentunya berbeda. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dimana setiap wilayah melakukan pengelolaan sendiri terhadap keuangannya. Sehingga sampai saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, juga pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang pada umumnya masih belum tertib. Hal ini tampak dari opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana masih sedikit yang mendapat opini wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa pengecualian (WTP). Ternyata sebagian besar masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP), disclaimer dan bahkan ada yang advers (tidak wajar).

Tabel 1.1 Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Provinsi Riau	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
2	Kab.Bengkalis	TMP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
3	Kab.Indragiri Hilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab.Indragiri Hulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab.Kepulauan Meranti	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
7	Kab.Kuantan Singingi	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab.Pelalawan	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP
9	Kab.Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kab.Rokan Hulu	WDP	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WDP
11	Kab.Siak	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP
12	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksanaan Semester I Tahun 2016

Keterangan: WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan)
TMP (Tidak Memberikan Pendapat)

Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kota Pekanbaru tahun 2015. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan Pemko Pekanbaru terhadap perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah (Suluhriau.com, 2 Juni 2015)

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dapat diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasinya yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif (Bastian, 2014). Suatu lembaga Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi dengan berjalannya waktu UU itu diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan good governance di Indonesia. UU ini dianggap sebagai pembawa semangat bagi penyelenggara pemerintah daerah yang partisipatif.

Good corporate governance merupakan suatu hal yang penting untuk mewujudkan peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap para pemegang saham (Desiana, 2012) Praktik *good governance* mensyaratkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholder* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan publik, alokasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengetahui berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, maka dapat mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik. Masyarakat secara mudah dapat menentukan apakah akan memberikan dukungan kepada pemerintahan, atau sebaliknya, kritik dan protes perlu dilakukan agar pemerintah lebih berpihak kepada kepentingan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Lebih dari itu, hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi dari setiap warga Negara agar dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah secara tepat

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, pengertian sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern merupakan faktor penting untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja pemerintah, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan pengendalian intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2007:186). Untuk itulah satuan pengawas internal dibentuk untuk mengevaluasi dan pemantauan terhadap aktivitas manajemen dalam pencapaian tujuan serta memastikan aktivitas organisasi telah dijalankan dengan efektif dan efisien (Asy"ari, dkk, 2014)

Didalam akuntansi, pengendalian intern yang berlaku dalam organisasi/instansi merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu dalam memberikan pendapat atas kewajaran laporan yang diauditnya auditor meletakkan kepercayaan atas efektifitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Dalam pencapaian prinsip *Good corporate governance* diperlukan sistem pengendalian internal yang baik dan dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan stakeholders serta menjalankan fungsi pengawasan atau pelaksanaan internal control dalam sebuah organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2013) menyimpulkan bahwa Penerapan *Good corporate governance* (GCG) pada Pemerintah Kota Bekasi telah ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Bekasi menyadari arti penting penerapan prinsip dan peranan GCG sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Bekasi. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aisyah dkk (2014) yang menyimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dengan semakin baik pemerintahan yang tercipta maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara signifikan.

Salah satu yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah stres kerja, Menurut (Wahyuni dkk, 2016) perubahan-perubahan yang terjadi dalam instansi pemerintahan, tingkat kebutuhan dan berbagai persoalan lain yang menuntut adanya kemampuan dari sumber daya manusia untuk dapat menyesuaikan diri baik secara fisik maupun psikis. Karena apabila penyesuaian tersebut gagal atau salah maka akan mengakibatkan stres ditempat kerja sehingga dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam menghadapinya. Stres kerja adalah sesuatu mengenai lingkungan kerja atau sifat pekerjaan itu sendiri yang menyebabkan stres yang dirasakan oleh individu (Bokti dan Mansor, 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maraknya kasus ASN yang mengakibatkan kinerja pemerintah menjadi ikut menurun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap tahun selalu ada ASN yang tertangkap tangan sedang melakukan penyelewengan tugas seperti menerima suap, membolos, dan bahkan terlibat narkoba. Hal ini tentu akan memperburuk kinerja pemerintah setempat. Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2016) menyimpulkan bahwa stress kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja aparat pemerintah, hal ini didukung pula oleh (Merlin dan Prasetyo, 2013)

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, masih terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja, maka pada penelitian ini peneliti menambahkan *research gap* yang mana *research gap* adalah sesuatu yang belum diteliti oleh peneliti-penelitian sebelumnya pada topic yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variable sistem pengendalian manajemen. Karena menurut Renyowiyojoko (2013) organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sugeng (2006:6-7), menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh *Good corporate governance*, Pengendalian Intern, Stres Kerja dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Pemerintahan Kota Pekanbaru"**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a) Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
b) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
c) Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
d) Apakah sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah
e) Apakah *good corporate governance*, pengendalian intern, stres kerja dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja pemerintah
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah
3. Untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja pemerintah
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja pemerintah

5. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance.* Pengendalian intern, stres kerja dan sistem pengendalian manajemen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai *Good corporate governance*, Pengendalian Intern, stress kerja, Sistem Pengendalian Manajemen dan kinerja

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *Good corporate governance*, Pengendalian Intern, stress kerja, Sistem Pengendalian Manajemen dan kinerja

3. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah Kota Pekanbaru.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat penelitian ini, serta kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis dari penelitian ini..

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi variabel penelitian yang digunakan, penentuan sampel dan populasi data yang akan digunakan. Selain itu bab ini juga berisi jenis dan sumber data, metode pengumpulan data yang akan digunakan, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, analisis data serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan keseluruhan hasil penelitian seperti kesimpulan, keterbatsan, dan saran-saran untuk perbaikan penelitian berikutnya untuk penelitian yang sama di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA